

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, serta saran berdasarkan hasil temuan penelitian. Secara umum *collaborative governance* pada percepatan penurunan *stunting* sudah berjalan dengan baik atau efektif dan efisien. Dengan adanya kolaborasi antar stakeholder maupun dinas terkait dapat membantu untuk menekan dan mengurangi angka *stunting* khususnya di kabupaten Bekasi, lebih jelas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menekan atau menurunkan angka *Stunting* yaitu dinkes memberikan Tablet penambah darah bagi remaja dengan diberikannya tablet penambah darah dapat menekan angka *Stunting* sejak dini, dinkes juga melakukan observasi sanitasi yang tidak layak di lingkungan masyarakat jika ditemukannya terdapat sanitasi yang tidak layak, dinkes melakukan perbaikan sanitasi tersebut dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah daerah yaitu membuat sanitasi yang layak bagi masyarakat diharapkan dapat menurunkan atau menekan angka *Stunting*. Diemukan pula hambatan dari strategi percepatan penurunan *Stunting* yaitu ketidakkonsistenan ibu dalam memberikan asi eksklusif pada balitanya yang seharusnya asi eksklusif diberikan pada balita umur 0

sampai 6 bulan tetapi karena keterbatasan orang tua yang harus bekerja maupun tidak konsisten dalam pemberian asi eksklusifnya.

Kondisi awal dalam penerapan *Collaborative governance* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dari tingginya angka *Stunting* di kabupaten Bekasi dan sulitnya prevalensi *Stunting* yang menurun, percepatan penurunan *stunting* tidak bisa dilakukan secara mandiri atau dengan satu instansi saja tetapi membutuhkan adanya proses kolaborasi dengan antar *stakeholders* untuk tercapainya strategi Percepatan Penurunan *Stunting*. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi terjadinya proses kolaborasi ini yaitu, adanya keterlibatan dari beberapa *stakholder* yang memiliki persamaan tujuan, tantangan dalam berkolaborasi dalam percepatan penurunan *Stunting* ini terdapat pada keterbatasan kekuasaan dalam mengelola anggaran yang diterima.

Dalam pelaksanaan kolaborasi percepatan penurunan *Stunting* para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dari percepatan penurunan *Stunting* yaitu untuk mengatasi dan menekan angka *Stunting*. Pada tahap pengimplementasian kolaborasi, para pemangku kepentingan memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* seperti Bupati Bekasi yaitu membuat kebijakan terkait percepatan penurunan *Stunting*, Dinas Kesehatan yang membuat program percepatan penurunan *Stunting*, puskesmas dan posyandu yang menjalankan program yang telah dibuat, dan masyarakat yang menerima program yang telah dijalankan oleh *stakeholders*.

Dinas Kesehatan selain membuat kebijakan mereka juga melakukan pengawasan ke puskesmas dan posyandu-posyandu untuk memastikan proses kolaborasi ini efektif dan efisien sehingga dampaknya bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dinkes juga memfasilitasi kepada puskesmas berupa tablet penambah darah yang selanjutnya diberikan kepada remaja untuk mencegah *Stunting* dari sejak dini selama 56 kali pemberian tablet tambah darah. Adapun peraturan yang menjadi dasar kolaborasi Percepatan Penurunan *Stunting* ini yaitu Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1928/2022 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*, Peraturan Bupati No. 205 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan dari setiap dinas dalam melaksanakan tugasnya memiliki Surat Keputusan (SK) dari setiap masing-masing unit kerjanya.

Dalam mewujudkan transparansi dalam proses kolaborasi percepatan penurunan *Stunting* yaitu setiap tahapan yang dilakukan selalu di laporkan setiap tahunnya, seperti posyandu yang melaporkan kepada puskesmas hasil dari penimbangan berat badan balita, tinggi badan balita, dan kasus *Stunting* di posyandu tersebut lalu diolah data tersebut oleh puskesmas dan akan dilaporkan kepada dinkes. Peneliti menganalisis bahwa tidak adanya transparansi dari pihak puskesmas maupun dinkes kepada masyarakat terkait data *Stunting* khususnya di kabupaten Bekasi. Permasalahan kasus *Stunting* di kabupaten Bekasi yang masih tinggi sehingga Bupati membuat kebijakan yaitu PerBup No.205 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Untuk angka *stunting* di kabupaten Bekasi

menurut EPPGBM yaitu pada tahun 2020 sebesar 9.480 atau 4,4% kasus *stunting*, pada tahun 2021 sebesar 9.354 atau 4,3% kasus *stunting*, dan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu 3.899 atau 1,6% kasus *stunting* sedangkan menurut penghitungan SSGI pada tahun 2021 sebesar 21%, pada tahun 2022 turun menjadi 17% berarti dengan dikeluarkannya kebijakan PerBup No.205 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* tersebut efektif dan efisien untuk menurunkan dan menekan angka *stunting* di kabupaten Bekasi.

Desa sukadami menjadi salah satu desa dalam percepatan penurunan *stunting* di kabupaten bekasi karena mengalami percepatan penurunan *stunting* yang cukup tinggi, angka *stunting* desa sukadami pada tahun 2018 sebesar 772 balita kasus *stunting* dan pada tahun 2020 turun drastis menjadi 60 balita kasus *stunting* dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2021 sebesar 110 balita kasus *stunting* dan pada tahun 2022 turun Kembali menjadi 29 balita kasus *stunting*, Desa sukadami mengalami percepatan penurunan *stunting*.

Terdapatnya perbedaan antara puskesmas sukadami dengan posyandu kenangan 9 Kecamatan setu desa cileduk dalam menangani kasus *stunting*, karena di puskesmas sukadami menyatakan bahwa mereka memberikan bantuan Pemberian Makanan Tambahan berupa telur puyuh, susu, makanan penadamping bagi ibunya dan diberikan hingga anak yang dinyatakan *stunting* benar-benar sudah terpenuhi gizinya, sedangkan PMT yang diterima oleh posyandu kenangan 9 dari Puskesmas Setu hanya berupa telur 1kg dan hanya diberikan 1 kali saja tidak adanya pengawasan Kembali dan tidak sampai anak yang dinyatakan *stunting* benar-benar sudah terpenuhi gizinya. Dari kedua perbedaan itu bisa ditarik kesimpulan

bahasannya desa sukadami dengan begitu dapat mencegah dan mengurangi angka *stunting* maka dari itu desa sukadami menjadi salah satu desa percepatan penurunan *stunting* yang tinggi. Sedangkan di posyandu kenangan 9 desa setu dalam penangannya masih kurang efektif untuk menurunkan angka *stunting*.

## **5.2 Rekomendasi**

Peneliti menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti kepada penelitian selanjutnya dan juga rekomendasi kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu, sebagai berikut:

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menambah kajian keilmuan khususnya Ilmu Administrasi Negara terkait *collaborative governance* karena teori tersebut memiliki relevan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah terhadap *stunting*.
2. Penelitian mengenai *collaborative governance* terutama di desa cileduk masih minim dan perlu dikembangkan lagi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan melalui pemilihan teori, metode, maupun objek daerah yang berbeda.

### 5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi institusi atau Lembaga dengan harapan bisa bermanfaat bagi institusi atau Lembaga tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan tetap perlu mengawasi proses kolaborasi ini walaupun proses kolaborasi ini sudah berjalan efektif dan efisien tetap harus adanya pengawasan dari dinkes agar proses kolaborasi ini terus dan tetap berjalan efektif dan efisien dan diharapkan tidak cepat puas dengan hasil proses kolaborasi ini yang sudah berjalan dengan baik. serta mempublikasikan hasilnya kepada publik untuk menciptakan transparansi dalam proses kolaborasi.
- b. Diharapkan kedepannya puskesmas tetap mengawasi posyandu-posyandu untuk penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pemberian tablet darah. Agar proses kolaborasi ini tetap berjalan efektif dan efisien dan diharapkan tidak cepat puas dengan hasil proses kolaborasi ini yang sudah berjalan dengan baik.
- c. Diharapkan kedepannya posyandu memiliki sistem pengawasan dan pendampingan terhadap balita yang dinyatakan *stunting* hingga anak anak *stunting* itu dinyatakan telah terpenuhi gizinya dengan baik.
- d. Mengenai *collaborative governance* khususnya di Kabupaten Bekasi sudah berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka *stunting* namun masih ada kendala terkait kekuasaan dalam mengelola anggaran bagi puskesmas yang harus menunggu bantuan dari Pemda perihal penyaluran Pemberian Makanan

Tambahan (PMT) bagi anak yang dinyatakan *stunting*, sehingga Dinas Kesehatan perlu adanya monitoring ke dinas-dinas maupun *stakeholders* lainnya.

- e. Diharapkan pemerintah kedepannya dapat memberikan bantuan bagi anak yang dinyatakan *stunting* sesuai dengan gizi anak yang dibutuhkan, agar anak yang dinyatakan *stunting* dapat terpenuhi gizinya dan perlu adanya pengawasan saat pemberian bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak yang dinyatakan *stunting*, agar tidak adanya perbedaan pada saat pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) saat disalurkan.
- f. Diharapkan pemerintah kabupaten Bekasi dapat menyediakan anggaran untuk kebutuhan anak penderita *stunting*.
- g. Diharapkan pemerintah kabupaten Bekasi dapat memperluas kolaborasi dengan corporate social responsibility (CSR) yang ada di wilayah kabupaten Bekasi untuk membantu kebutuhan anak *stunting*.